



Kejari Kebut Kasus

Perjalanan Dinas DPRD

MEMPAWAH, SP
 - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah memeriksa secara intensif kasus dugaan tindakan penyimpangan perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah, tahun 2014-2016. Kejari menegaskan, awal Februari ini, bakal ada penetapan tersangka.

Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, Dwi Agus Arfianto menegaskan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil dari penghitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengenai besaran ke-

• **Baca Halaman 7**

Dwi Agus Arfianto
 Kajari Mempawah

Nantinya akan dilakukan gelar perkara, dan akan ditetapkan tersangka yang diperkirakan Februari 2018 ini.

Andi Kamarudin
 Ketua LI-Tipikor Aparatur Negara RI

Jadi, diharapkan agar kasus ini bisa terungkap secepatnya.



Hal 1 ■ kejar kebut

rugian uang negara dalam kasus tersebut.

"Nantinya akan dilakukan gelar perkara, dan akan ditetapkan tersangka yang diperkirakan Februari 2018 ini," tegasnya, Rabu (31/1).

Menurutnya, dalam melakukan pemeriksaan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Mempawah, pihaknya sudah mengirimkan data mengenai invoice maskapai Lion Air dan Sriwijaya. Sedangkan maskapai dari Batavia Air tak bisa, karena perusahaannya sudah gulung tikar alias bangkrut.

"Jadi, informasi dari BPK satu bulan," ujarnya.

Sebelumnya, pihak kejaksaan sudah melakukan pemeriksaan saksi terhadap pihak maskapai, biro jasa dan travel, dan beberapa anggota dewan yang menikmati perjalanan dinas tersebut. Bahkan, beberapa wakil unsur pimpinan juga sudah diperiksa.

Menurutnya, berapa orang dan siapa-siapa saja yang telah menikmati dana tersebut, belum bisa dirilis atau disiarkan. Namun, setelah hasil dari pihak BPK keluar nominal atau jumlah kerugiannya, akan dilakukan gelar perkara tim

Mempawah, dan setelah itu baru bisa ditetapkan sebagai tersangka.

"Makanya, seluruh data dan alat bukti terjadinya penyelewengan perjalanan dinas di DPRD Mempawah, sudah diserahkan di BPK. Tinggal menunggu hasilnya, dan siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan dinas DPRD Mempawah," jelasnya.

Menurutnya, modus perjalanan dinas di Kabupaten Mempawah, terdapat dua modus. Yaitu, kelebihan hari, dan perjalanan fiktif. Dimana sudah ditemukan oleh BPK saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Umum.

"Jadi, ini tindak lanjut LHP Pemeriksaan Umum oleh BPK, atas pengelolaan keuangan di DPRD Mempawah," tegasnya.

Kajari mengatakan, kendala dalam menangani permasalahan dana perjalanan DPRD Kabupaten Mempawah, bukan terkait kelambanan penanganan. Namun, pihaknya harus mereview atau melihat berbagai data yang ada dari 2014-2016, mendaftari maskapai penerbangan

ke kantor pusat di Jakarta, sebab data tersebut tak ada di Pontianak.

"Data yang ada di BPK itu hanya dokumen foto copy. Dalam penanganan pro justisia dibutuhkan data atau dokumen yang asli. Alhamdulillah, bisa diselesaikan Januari 2018 silam," jelasnya.

Menurutnya, kejaksaan tak mau terburu-buru dan gegabah dalam menetapkan tersangka. Sebab, dalam penetapan tersangka harus bersifat kehati-hatian.

Banyak Dipanggil

Sementara itu, satu di antara orang yang tak mau disebutkan namanya di DPRD Mempawah mengatakan, pihaknya sudah mengikuti arahan pemanggilan dari Kejari Mempawah. Dimana sudah ada beberapa dewan di DPRD Kabupaten Mempawah yang sudah dilakukan pemanggilan oleh pihak Kejari Mempawah.

"Banyak yang dipanggil, dari dewan yang masih aktif dan ada yang sudah tak aktif lagi," jelasnya.

Menurutnya, harapan kedepannya dengan adanya temuan ini, semoga semuanya

bisa terlepas dan tak ada temuan kembali.

"Temuan ini mungkin karena ketidaksengajaan, hingga terjadi temuan," jelasnya.

Apresiasi Kejari

Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia di Kalimantan Barat, Andi Kamarudin mengapresiasi kinerja Kejari Mempawah, dalam penanganan kasus tindakan dugaan pidana korupsi di perjalanan dinas DPRD Kabupaten Mempawah.

"Jadi, kita mendukung tindakan Kejari Mempawah dalam mengungkap para pejabat Negara," jelasnya.

Menurutnya, dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, diharapkan pihak Kejari Mempawah mengungkap, siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam perjalanan dinas DPRD Mempawah.

Dia berharap agar penanganan kasus ini bisa dilakukan secepatnya, karena kasus ini sudah masuk dalam penyidikan.

"Jadi, diharapkan agar kasus ini bisa terungkap secepatnya," tegasnya. (ben/lis)